

# STATUS, ANCAMAN, DAN KONSERVASI EKOSISTEM PESISIR DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DI INDONESIA

Udhi Eko Hernawan

Peneliti Pertama Pusat Penelitian Oseanografi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRAK

Wilayah geografis yang luas dengan mozaik ribuan pulau yang membentuk garis pantai sepanjang lebih dari 90.000 km membuat Indonesia kaya dengan ekosistem pesisir, terutama terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Ekosistem pesisir ini memberikan jasa yang besar bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Namun demikian, monitoring yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Oseanografi menunjukkan bahwa sebagian besar terumbu karang dan padang lamun di Indonesia berada dalam tekanan kehilangan habitat (*habitat loss*). Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir, ditambah dengan perubahan iklim global, mengancam kelestarian ekosistem pesisir dan sumber daya hayati yang hidup di dalamnya. Pemulihan kondisi dan perlindungan habitat diperlukan untuk menjaga pesisir dan laut Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia sekaligus sumber kehidupan untuk jutaan orang.

# PEMBELAJARAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Dasril

Kepala Dinas Perikanan Kota Pariaman

## ABSTRAK

Kota Pariaman, berada pada pesisir Barat Pulau Sumatera, mempunyai panjang garis pantai 12,73 Km yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi seperti, hamparan pantai yang landai disepanjang pantai dan pasir putih di pulau-pulau kecil, ekosistem terumbu karang, mangrove, habitat penyu, dll. Sebagai upaya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Kota Pariaman telah menetapkan beberapa kebijakan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi kawasan ini adalah sebagai destinasi wisata pesisir dan pulau-pulau kecil baik untuk wisatawan lokal maupun internasional. Sektor wisata telah membuka lapangan kerja kurang lebih bagi 80 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah pengunjung perbulannya kurang lebih 75.000 orang. Keuntungan dari sektor wisata diperkirakan mencapai Rp 86.920.000.000/tahun. Oleh karena itu, untuk melindungi kawasan agar tetap bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata dan juga agar sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Pariaman, maka Kota Pariaman dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Kota Pariaman seluas 11.525,89 Ha berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 334/523/2010.

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KONSERVASI PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN MEMANFAATKAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI TAMAN PESISIR PANTAI PENYU PANGUMBAHAN KABUPATEN SUKABUMI**

**Ahman Kurniawan**

Kepala Balai Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Wilayah Selatan Pangumbahan

**ABSTRAK**

Lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil kondisinya saat ini sudah cukup memprihatinkan. Telah terjadi banyak kerusakan ekosistem laut dan pesisir akibat ulah dan keserakahan manusia yang hanya memikirkan dan meraih keuntungan sesaat untuk kepentingan dirinya sendiri. Rusaknya ekosistem di laut dan pesisir akan sangat merugikan masyarakat yang terdampak langsung, juga berimplikasi pada ekosistem di darat yang dapat mengganggu siklus kehidupan dan pada akhirnya merugikan umat manusia. Pengelolaan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang efektif adalah solusi untuk mencegah dan menanggulangi rusaknya ekosistem laut dan pesisir. Pengelolaan Konservasi yang efektif adalah dengan melaksanakan gerakan konservasi berbasis masyarakat dengan menggunakan strategi kemitraan. Pemerintah sebaiknya lebih mengoptimalkan diri selaku regulator dan fasilitator dan dalam implementasinya menerapkan kemitraan antara Pemerintah dengan masyarakat luas (Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Dunia Usaha) sesuai dengan proporsinya masing-masing.

## MPAS FOR FISHERIES: FROM POLICY TO IMPLEMENTATION

Peter J. Mumby

*Lecturer and Head of Marine Spatial Ecology Lab, University of Queensland*

### **ABSTRACT**

*MPAs have diversified from a conservation tool into a means of helping managing and rebuilding fisheries. Their application is particularly important in areas where illegal and unregulated fisheries predominate, including many tropical coasts. But the design of MPAs – or more specifically no-take reserves (core zones) – differs between conservation action and fisheries management. Here I begin by considering overall policy questions concerning the use of reserves to rebuild and sustain fisheries. I argue that 20%-30% of habitat can be set aside to provide optimal support for rebuilding fisheries. Moreover, I show that adequate resourcing of reserves (e.g., staff, enforcement) is vital to obtain favourable outcomes for people. Once an MPA policy has been established I then describe how it can be designed using state-of-the-art data on the connectivity fish populations via ocean currents. This is illustrated with examples from Indonesia. I close by discussing some of the key needs to advance MPA implementation.*

# **KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN : INVESTASI CERDAS UNTUK PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DAN MEMBANGUN PERIKANAN INDONESIA**

**Wawan Ridwan**

Direktur Program Coral Triangle WWF-Indonesia

## **ABSTRAK**

Laut Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia, namun saat ini ancaman terhadap habitat pesisir masih terus terjadi secara intensif dan menyebar. Hampir seluruh (95%) ekosistem terumbu karang Indonesia terancam punah oleh berbagai kegiatan antropogenik dan perubahan iklim, dan bahkan 35% diantaranya memiliki tingkat ancaman yang tinggi atau sangat tinggi (Burke, et al.,2012). Sebagai solusinya, WWF-Indonesia mendorong konsep pengelolaan “Kawasan Konservasi Perairan untuk Perikanan Berkelanjutan” untuk diadaptasi oleh pemerintah nasional, akademisi, mitra, pelaku bisnis dan kelompok masyarakat untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan mendorong perikanan berkelanjutan di Indonesia. Konsep ini dibangun berdasarkan berbagai kajian ilmiah, serta pembelajaran dan cerita sukses dari kegiatan konservasi perairan yang dilakukan oleh WWF-Indonesia dalam beberapa decade belakangan. Terdapat delapan pendekatan saling terintegrasi yang harus diimplementasikan secara menyeluruh, yaitu : (1) mengoptimalkan desain Kawasan Konservasi Perairan (KKP), (2) membangun jejaring KKP, (3) menerapkan strategi pemanfaatan perikanan di setiap KKP, (4) memberikan hak eksklusif perikanan untuk masyarakat dan nelayan local, (5) mengimplementasikan ppraktek pengelolaan yang lebih baik, (6) membangun mekanisme pendanaan berkelanjutan, (7) mendorong transformasi perikanan, dan (8) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Penerapan delapan pendekatan ini merupakan investasi cerdas dan efektif untuk melindungi ekosistem laut sekaligus mengelola stok perikanan, dengan biaya pengelolaan yang minimal. Perikanan yang sehat dan berkelanjutan bisa memutar roda perekonomian nasional dan menjamin ketahanan pangan laut untuk sebagian besar masyarakat Indonesia.

# MEMBANGUN SEKTOR MARITIM, KELAUTAN, DAN PERIKANAN DI INDONESIA: TANTANGAN DAN KESEMPATAN

Andi Rusandi

Direktur Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut – Dirjen Pengelolaan Ruang Laut,  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

## ABSTRAK

Laut dan perairan Indonesia selama ini telah menjadi bagian utama dari sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Laut merupakan 2/3 tutupan wilayah tanah air Indonesia. Laut dan perairan telah menyediakan sumberdaya dan sarana untuk memenuhi kebutuhan pangan, transportasi, rekreasi, dan bahkan religi. Secara global masyarakat dunia juga memberikan perhatian dan komitmen yang sangat kuat pada upaya keberlanjutan pembangunan di laut dan konservasi keanekaragaman hayatinya. *The big five* dari kesepakatan konservasi keanekaragaman hayati tersebut adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Konvensi Perdagangan Internasional Flora dan Fauna terancam punah (Cites), Konvensi perlindungan ekosistem lahan basah (Ramsar), Konvensi warisan dunia (World Heritage Convention), dan Konvensi Spesies Migrasi (CMS). Secara spesifik target-target internasional juga sudah ditetapkan seperti target perlindungan 10% perairan laut sebagai kawasan konservasi dan menurunnya trend kepunahan spesies.

Untuk menjawab tantangan kebutuhan pangan, sumberdaya, ruang, serta menghadapi perubahan iklim sebagaimana kondisi tersebut di atas, maka terdapat isu besar dalam konteks pembangunan maritim, kelautan, dan perikanan secara nasional dan global, yaitu menjaga keseimbangan antara tiga kepentingan: Konservasi keanekaragaman hayati perairan; Pembangunan perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan; dan Pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan di tengah perubahan iklim.